



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp. +6221-3850455, Faks. +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : T/169/KP.02.02/X/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Seleksi Terbuka JPT Pratama untuk Jabatan
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Tata Laksana pada PPATK

7 Oktober 2019

Kepada Yth.

Daftar Nama Terlampir

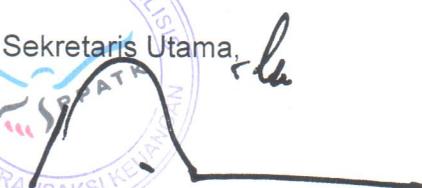
di

Tempat

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompatitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana di PPATK dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di instansi Saudara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi jabatan dimaksud.

Untuk itu kami mohon bantuan Saudara menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di instansi Saudara mengenai pengisian jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana pada PPATK. Mengenai persyaratan dan informasi lainnya dapat dilihat melalui website <https://www.ppatk.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Rinardi

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Kepala PPATK.

Lampiran Surat

Nomor : T/ /KP.02.02/X/2019

Tanggal : Oktober 2019

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.
7. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
28. Sekretaris Kementerian Pariwisata.
29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
31. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
32. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
33. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
34. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
35. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.
36. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI.
37. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.
38. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
39. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
40. Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Daerah RI.
41. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
42. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
43. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI;
44. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.
45. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
46. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
47. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
48. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

r h

49. Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional.
50. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI.
51. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara.
52. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
53. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara.
54. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
55. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut.
56. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal.
57. Sekretaris Utama Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika.
58. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional.
59. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
60. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
61. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
62. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
63. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
65. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
66. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional.
67. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional.
68. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional.
69. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara RI.
70. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
71. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
73. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
74. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
75. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

PEMERINTAH DAERAH

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta.
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

h

27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
29. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

~ h



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia

Telepon : +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili : +6221-3856809 +6221-3856826

Email : Contact-us@ppatk.go.id Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2019

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut :

1. JABATAN YANG LOWONG

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah Jabatan **KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (Eselon IIa)** pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana.

2. PERSYARATAN UMUM

- 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Usia maksimal 56 tahun pada tanggal 1 Januari 2020;
- 3) Pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol.IV/b);
- 4) Pendidikan paling rendah D-IV /S-1;
- 5) Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai BAIK pada tahun 2017 dan 2018;
- 6) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya yang relevan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) Memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan;
- 8) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif 5 (lima) tahun;
- 9) Bersedia melepaskan jabatannya sebagai Komisaris pada BUMN/BUMD/ Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi, dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut setelah diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 10) Tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- 11) Tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir;
- 12) Tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana; dan
- 13) Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yang Berwenang untuk mengikuti proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

3. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan Khusus untuk Jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana :

- 1) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS 5,0 (masa berlaku 2 tahun);
- 2) Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Administrator;
- 3) Telah mengikuti dan lulus Diklat Penjurusan Jabatan Fungsional Tingkat Madya bagi pelamar yang pernah/sedang menduduki Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian jenjang Ahli Madya;
- 4) Memiliki pengetahuan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, Kelembagaan, Pelayanan Publik, Manajemen Risiko, Kebijakan Publik, dan pemahaman Reformasi Birokrasi; dan
- 5) Memahami pengetahuan dasar tentang rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

4. DOKUMEN ADMINISTRASI

- 1) Surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dengan melampirkan pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
- 2) Daftar Riwayat Hidup ditandatangani oleh Pelamar (**Formulir Pansel PPATK-1**);
- 3) Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- 4) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian Madya yang dilegalisir;
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal yang dilegalisir;
- 6) Fotokopi KTP, NPWP, dan SPT Tahunan (tahun terakhir);
- 7) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilegalisir;
- 8) Bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada jabatan saat melamar;
- 9) Surat Pernyataan Pakta Integritas (**Formulir Pansel PPATK-2**);
- 10) Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dari Komisaris BUMN/BUMD/ Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi dan/atau jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan yang dilamar (**Formulir Pansel PPATK-3**);
- 11) Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik saat melamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (**Formulir Pansel PPATK-4**);
- 12) Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir (**Formulir Pansel PPATK-5**);
- 13) Surat Pernyataan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana (**Formulir Pansel PPATK-6**); dan
- 14) Surat Pernyataan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pejabat yang Berwenang untuk mengikuti proses seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

5. TAHAPAN SELEKSI

- 1) Seleksi Administrasi ;
- 2) Penulisan Makalah ;
- 3) Tes Kesehatan (*Medical Check Up* dan *Psikometri*);
- 4) Seleksi Kompetensi (*Assessment Center*); dan
- 5) Presentasi Makalah dan Wawancara Akhir.

6. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi	7 Oktober – 24 Oktober 2019
2.	Pendaftaran Peserta	8 Oktober – 25 Oktober 2019
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	31 Oktober 2019
4.	Penulisan Makalah	4 November 2019
5.	Pengumuman Seleksi Penulisan Makalah	11 November 2019
6.	Tes Kesehatan (<i>Medical Check Up</i> dan <i>Psikometri</i>)	13-14 November 2019
7.	Pengumuman Tes Kesehatan (<i>Medical Check Up</i> dan <i>Psikometri</i>)	22 November 2019
8.	Seleksi Kompetensi (<i>Assessment Centre</i>)	25 - 26 November 2019
9.	Presentasi Makalah dan Wawancara	9 - 10 Desember 2019
10.	Pengumuman 3 (tiga) Terbaik	12 Desember 2019

7. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini tidak dipungut biaya apapun;
- 2) Berkas administrasi (*softcopy*) dikirimkan dalam format dokumen PDF melalui email pansel@ppatk.go.id (ukuran lampiran maksimal 9 MB) paling lambat tanggal **25 Oktober 2019**;
- 3) Seleksi Administrasi, Penulisan Makalah, dan Tes Kesehatan bersifat menggugurkan;
- 4) Berkas administrasi (*hardcopy*) dibawa pada saat mengikuti Penulisan Makalah pada tanggal 4 November 2019;
- 5) Hal-hal yang terkait dengan perubahan jadwal seleksi akan diberitahukan kemudian melalui website <https://www.ppatk.go.id>;
- 6) Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 7) Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi dapat menghubungi *Call Center* (021) 3850455 / 3853922, Senin s.d Jum'at pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Jakarta, 7 Oktober 2019
Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama,



Pas Foto

4 x 6

Formulir PANSEL PPATK-1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	:	
2.	Tempat dan Tanggal lahir	:	
3.	NIP.	:	
4.	Pangkat / Gol.Ruang	:	
5.	TMT Pangkat / Gol. Ruang	:	
6.	Alamat Tempat Tinggal / Domisili	:	
7.	Nomor Telepon / HP	:	
8.	Alamat Email	:	
9.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan*)
10.	Agama	:	
11.	Status Perkawinan	:	Belum/Menikah*)
12.	a. Nama Istri/Suami*)	:	
13.	b. Jumlah Anak	: Orang
14.	Riwayat Pendidikan Formal	:	a. b. dst...
15.	Pendidikan Keahlian/Profesi	:	a. b. dst...
16.	Pengalaman Pekerjaan (ditambahkan <i>achievement</i> pada setiap level jabatan dan dokumen pendukung)	:	a. b. dst....
17.	Pengalaman Organisasi (ditambahkan <i>achievement</i> pada setiap level jabatan dan dokumen pendukung)	:	a. b. dst....
18.	Pengalaman yang mendukung	:	a. b. dst....
19.	Penghargaan yang relevan yang pernah diperoleh (disertai bukti fotokopi)	:	a. b. dst....
20.	Berikan 3 (tiga) nama orang di luar keluarga, yang dapat memberikan referensi untuk anda, disertai nomor telepon yang dapat dihubungi	:	a. b. c.

....., 2019

Pemohon,

(nama lengkap)

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jabatan :

Unit organisasi :

Alamat / Domisili :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2019



(_____)
NIP.

Keterangan :
**) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar*

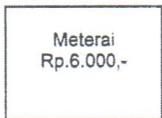
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit organisasi :
Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia **mengundurkan diri dari Komisaris BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Pengawas, Pengurus Koperasi dan/atau jabatan profesi lainnya** yang berhubungan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, apabila diangkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar.
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2019



(_____)
NIP.

Keterangan :
*) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit organisasi :
Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik saat melamar***).
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2019



(.....)
NIP.

Keterangan :
**) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. Ruang :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Jabatan :
 Unit organisasi :
 Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat paling kurang dalam periode 2 (dua) tahun terakhir.**
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2019



(_____)
 NIP.

Keterangan :

**) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jabatan :

Unit organisasi :

Alamat / Domisili :

1. Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya **tidak pernah atau sedang menjalani hukuman pidana**.
2. Saya bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... 2019

Meterai
Rp.6.000,-

(_____)
NIP.

Keterangan :

**) Tulis sesuai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilamar*